

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, dan memiliki penduduk yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya, termasuk di kota maupun daerah pedesaan. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat peningkatan signifikan pada jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 270,203,9 jiwa, meningkat menjadi 272,682,5 jiwa pada tahun 2021, dan terus bertambah menjadi 275,773,8 jiwa pada tahun 2022.¹ Meskipun terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup besar, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampaknya, muncul berbagai permasalahan yang secara konsisten menjadi bagian dari proses pertumbuhan, termasuk masalah-masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya.

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami oleh Indonesia, menyebabkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan yang cepat. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan pemasukan yang rendah, menjadikan masyarakat merasa terhimpit dan menjadi korban. Bukan hanya orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pendidikan masyarakat yang mengakibatkan ruang gerak mereka menjadi terbatas. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yakni keberadaan anak jalanan yang menjadi persoalan setiap tahunnya, sehingga

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Di Indonesia (Ribuan Jiwa), 2020-2022," n.d., <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>.

membutuhkan penanganan yang komprehensif.² Berbagai kebijakan dan program telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas permasalahan anak jalanan di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah anak jalanan tersebut. Namun kenyataannya keseluruhan upaya tersebut hanya bersifat formalitas.³

Fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang diinginkan, karena mereka berada dalam situasi yang tidak menentu dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Keberadaan mereka sering menjadi masalah bagi berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan masih kurang dan belum solutif. Padahal, mereka adalah bagian dari kita. Mereka adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab, dan memiliki masa depan yang cerah.⁴

Keberadaan anak jalanan akan menentukan wajah kota karena kelompok ini memiliki peran besar sehingga harus mendapatkan perhatian yang besar pula, terutama dari Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 UUD 1945, Negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

² A Herlina, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat* 5, no. 2 (2014): 145–55.

³ Muhrisun Afandi, "Meninjau Kembali Kebijakan Dan Program Reunifikasi Anak Jalanan Di Indonesia," *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.14421/panangaran.2018.0201-03>.

⁴ Sakman Sakman, "STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar)," *Supremasi* 11, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2816>.

Fakir miskin serta anak terlantar, termasuk gelandangan dan anak jalanan, menjadi tanggung jawab Negara untuk dipelihara dan diberdayakan.⁵ Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai amanat dari Konstitusi Negara Indonesia. Dengan memperhatikan dan memberdayakan anak jalanan, pemerintah tidak hanya memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya tetapi juga berkontribusi dalam membentuk citra kota yang lebih positif dan manusiawi.

Keberadaan anak jalanan sangat umum di berbagai kota besar di Indonesia, di mana mereka dapat ditemukan di setiap sudut kota. Situasi serupa juga terlihat di Kota Jambi, di mana mudah menemukan anak-anak jalanan baik di tempat-tempat umum seperti perempatan lampu merah, pasar, halte bus, mall, warung, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan anak jalanan selama berada di jalanan pun bermacam-macam, ada anak jalanan yang mengamen, meminta-minta, atau bahkan berjualan.⁶ Di Kota Jambi Anak jalanan terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, berkelompok dengan rentang usia 9 – 15 tahun. Kedua, Individu dengan rentang usia 17 tahun keatas dan ketiga, anak punk dengan rentang usia 15 tahun keatas, dan anak jalanan tersebut didominasi oleh laki-laki.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.

⁶ Mustafa Ali, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Abdi Abdi, “Strategi Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Makassar,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 5 (2021): 1662–76, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2582>.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Anak Jalanan Kota Jambi 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2019	76
2	2020	107
3	2021	90
4	2022	104
5	2023	33

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi

Pada data tersebut dapat dilihat kasus anak jalanan di Kota Jambi selama lima tahun terakhir. Data tersebut merupakan data anak jalanan yang telah diamankan dan dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial Kota Jambi yang kemudian setelah dilakukan penanganan berupa bimbingan mental, pembinaan agama, bimbingan sosial/keterampilan anak jalanan tersebut akan dipulangkan ke keluarganya dan ada pula yang dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Kebanyakan anak jalanan tersebut menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kota Jambi. Pada tahun 2019 dan 2021 Kota Jambi terpilih sebagai peraih penghargaan kota layak anak Tingkat madya.⁷⁸ Pada tahun 2022 Kota Jambi meraih penghargaan kota layak anak Tingkat nindya.⁹ Dan pemerintah kota jambi Kembali

⁷ Administrator, "Enam Daerah Di Jambi Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak," Metro Jambi, 2020, <https://www.metrojambi.com/metro/13531636/Enam-Daerah-di-Jambi-Dapat-Penghargaan-KabupatenKota-Layak-Anak>.

⁸ Administrator, "Kota Jambi Diganjar Penghargaan KLA Level Madya," Jambione.com, 2021, <https://www.jambione.com/megapolitan/1362676778/Kota-Jambi-Diganjar-Penghargaan-KLA-Level-Madya>.

⁹ Donapiscesika, "Bertabur Prestasi, Kota Jambi Upgrade Kota Layak Anak Jadi Kategori Nindya," JAMBIEXPRES.CO.ID, 2022, <https://jambiexpres.disway.id/read/630095/bertabur-prestasi-kota-jambi-upgrade-kota-layak-anak-jadi-kategori-nindya>.

terpilih sebagai peraih penghargaan kota layak anak pada tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diselenggarakan di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Al Haris selaku Gubernur Provinsi Jambi kepada kepala daerah yang meraih penghargaan Kota Layak Anak.¹⁰

Kota layak anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sistem ini direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kota Jambi berkomitmen untuk menjadikan dirinya sebagai kota layak anak dengan memenuhi berbagai indikator layak anak yang telah ditetapkan.¹¹

Namun, pada praktiknya, Penanganan anak jalanan di Kota Jambi nampaknya terjebak dalam pola rutinitas yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok, tanpa adanya upaya inovatif yang dapat memberikan dampak signifikan pada keberadaan mereka. Pendekatan yang terus-menerus mengikuti pola *Business As Usual* cenderung mempertahankan kondisi yang ada tanpa membuka peluang untuk solusi yang lebih efektif. Kurangnya inovasi dalam

¹⁰ Amalia Rizki, "Penganugerahan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Jambi," Radio Republik Indonesia, 2023, <https://www.rrl.co.id/daerah/330293/penganugerahan-kota-layak-anak-kabupaten-kota-jambi>.

¹¹ Reza Amarta Prayoga Riri Maria Fatriani, Dodi Al Vayed, "Kota Ramah Anak: Konstelasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Jambi," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, No.1 (2024): 681–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/020242451>.

penanganan ini bisa berdampak pada keterbatasan dalam memberikan solusi yang tepat bagi anak jalanan.

Kegiatan yang bersifat rutin seringkali tidak responsif terhadap perubahan dinamis yang terjadi baik di kalangan anak jalanan maupun di lingkungan sekitarnya. Sebagai akibatnya, potensi dan kebutuhan individual anak jalanan mungkin terabaikan, sementara program-program yang ada mungkin tidak lagi relevan dengan perubahan sosial dan lingkungan yang terus berkembang. Dengan kurangnya inovasi, peluang untuk melibatkan berbagai pihak, menciptakan program-program yang lebih adaptif, serta memberikan dampak yang lebih berarti bagi anak jalanan dapat terlewatkan. Inovasi sangat diperlukan agar penanganan anak jalanan tidak hanya berjalan dalam lingkup rutinitas, melainkan juga mampu menciptakan solusi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masa depan mereka.

Anak jalanan berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak¹². Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan

¹² Andi Muhammad Idkhan Syaharuddin, Andi Agustang and Rifdan, "Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 5, No.4 (2021): 1621–26, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2582/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.¹³ Selain itu, keberadaan anak jalanan biasanya juga dikoordinir oleh oknum tertentu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bahren Nurdin Selaku Pengamat Sosial Kota Jambi, sebagai berikut:

“Mereka (anak jalanan) dipabrikasi, maksudnya yaitu mereka dijadikan pabrik untuk mencari uang oleh oknum-oknum tertentu. Biasanya mereka akan diantar menggunakan mobil dan sorenya akan dijemput, dan kemudian uang yang mereka peroleh akan dibagi”¹⁴

Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan yang tidak ada ujungnya dan terus terjadi dari tahun-ketahun dikarenakan hal tersebut sudah menjadi budaya yang melekat pada setiap oknum.

Keberadaan Anak jalanan seringkali menimbulkan masalah salah satunya yakni pada ketertiban lalu lintas, ketertiban umum dan keamanan di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan perhatian dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah semata, tetapi juga lembaga lain, orang tua, dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya penanganan anak jalanan¹⁵. Maka diperlukannya koordinasi antar Pemerintah agar permasalahan dapat terselesaikan. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama anatara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-

¹³ Ibrahim Arifin Octafani Rempe, Muh. Yusril Ilyas, Ahmad Fajri Shafwan, Muhammad Syukur, “Meninjau Tantangan Dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan : Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4 (2023): 448–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/japendi.v4i05.1761>.

¹⁴ Bahren Nurdin, Pengamat Sosial Kota Jambi, Wawancara, 04 Juni 2024, Pukul 11.40 WIB

¹⁵ Dodi Faedlulloh Vita Rachmawati, “Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan,” *Journal of Political Issues* 2, No 2 (2021): 67–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>.

tugas tertentu demikian rupa, sehingga mendapat, saling mengerti, saling membantu, dan saling melengkapi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 mengenai Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG), dan Anak Jalanan, disebutkan bahwa upaya penanggulangan terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Jambi dilakukan secara terpadu oleh pemerintah setempat. Berdasarkan Perwako No. 29 Tahun 2016 Penanganan ini terdiri atas usaha preventif seperti pendataan terhadap titik-titik rawan dan patroli. Kemudian usaha Represif seperti razia, penampungan tetap, penyuluhan, bimbingan mental, keagamaan dan dikembalikan ke tempat asal. Selain itu terdapat usaha rehabilitasi sosial seperti bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan penyaluran. Pendekatan ini melibatkan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya.¹⁶ Dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Jambi, pemerintah kota membentuk Tim terpadu yang terdiri dari atas Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁷ Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) juga dilakukan karena DPMPPA berperan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi, memberikan edukasi, serta advokasi untuk anak jalanan yang mungkin mengalami eksploitasi atau kekerasan. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang

¹⁶ Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan

¹⁷ Setarjam, "Pemkot Jambi Membentuk Tim Terpadu Untuk Penertiban Anak Jalanan," SeputarJambi.com, 2023, <https://seputarjambi.com/2023/07/05/pemkot-jambi-membentuk-tim-terpadu-untuk-penertiban-anak-jalanan/>.

efektif dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Kota Jambi.

Guna menunjang penelitian ini, maka diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah yakni penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai referensi agar peneliti dapat menyajikan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga diperlukan agar permasalahan yang diteliti dapat memberikan hasil dan sumbangsih pemikiran yang berbeda, sehingga memunculkan beberapa masukan dan kritikan yang membangun sebagai pertimbangan untuk kedepannya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun, Peneliti	Metode	Hasil
1.	Pengawasan Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Jambi. (2020), Bi Ismi Hasanah ¹⁸	Metode penelitian Yuridis empiris	Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial.

¹⁸ Bi Ismi Hasanah and Latifah Amir, "Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Jambi," *MENDAPO* Volume 1 N (2020): Halaman 132-148, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.11063>.

2.	Peranan Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi. (2021), Silvy Amira Fadini ¹⁹	Metode Penelitian empiris	Hasil penelitian bahwa peranan Kepolisian Dalam Bidang Preventif, Upaya Preventif atau pencegahan jauh lebih efisien dari pada mendidik. Upaya Preventif pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Sedangkan untuk dibidang Represif memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang.
3.	Analisis Pembinaan Moral Anak Jalanan Di Kota Jambi. (2021), Deby Oktaviola, Drs. Irzal Anderson, Dona Sariyani ²⁰	Pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan moral anak jalanan di Dinas Sosial Kota Jambi masih kurang efektif yang ditunjukkan dengan masih ditemuinya hambatan atau permasalahan yang ditemukan peneliti yaitu masih kurangnya sumber daya manusia atau petugas, kurangnya sarana/fasilitas, kurang efektifnya waktu untuk memberikan pembinaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kebaruan dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas mengenai koordinasi

¹⁹ Silvy Amira Fadini, "Peranan Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan Di Kota Jambi" (Jambi, 2021).

²⁰ Dona Sariyani Deby Oktaviola, Drs. Irzal Anderson, "Analisis Pembinaan Moral Anak Jalanan Di Kota Jambi," *Civic Education Perspective Journal*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/cepj.v1i2.18014>.

pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi. Kekosongan ini menunjukkan bahwa studi mengenai topik tersebut belum terjamah, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru dan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada. Dengan fokus pada bagaimana koordinasi pemerintah selama ini dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi kebaruan penting karena mengupas secara spesifik bagaimana pemerintah melakukan koordinasi untuk menangani permasalahan anak jalanan, sebuah isu yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan kerja sama yang solid.

Koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi memegang peranan krusial dalam menyoroti dan merespons persoalan yang sangat relevan di tengah-tengah masyarakat. Anak jalanan di Kota Jambi, seperti di banyak tempat lainnya, merupakan kelompok yang sangat rentan dan seringkali terpinggirkan. Mereka berhadapan dengan risiko eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Koordinasi antara pemerintah menjadi sangat penting dalam merumuskan solusi komprehensif untuk permasalahan ini. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki suatu tujuan dari apa yang akan diteliti. Persoalan ini perlu dilakukan agar dapat dijadikan acuan dalam setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dan menjadi suatu target dari kegiatan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi Pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam koordinasi penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis,

Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial serta menambah sebuah

pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Koordinasi Pemerintah Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Jambi.

2. Secara praktis,

Menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai pemahaman penanganan anak jalanan melalui koordinasi pemerintah di Kota Jambi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang belum terjawab secara jelas atas permasalahan yang diteliti dan peneliti juga mendapatkan pengalaman dari penelitian ini. Dan diharapkan bahwa penelitian ini dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan menjadi referensi yang berguna, serta menjadi sumber acuan bagi penelitian selanjutnya, mencakup berbagai kalangan, terkait koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi, setiap pemimpin perlu mengoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi untuk menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, komunikasi yang tepat, dan pembagian pekerjaan yang baik oleh manajer, setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi dalam pekerjaan dari setiap individu karyawan, tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Koordinasi diperlukan dalam pekerjaan tim untuk mengarahkan dan menyeimbangkan tim dengan memberikan tugas yang sesuai kepada setiap anggota serta memastikan kegiatan dilaksanakan secara selaras. Menurut MC Farland, koordinasi adalah proses di mana pemimpin memastikan kesatuan tindakan bawahannya dalam mengembangkan usaha kelompok secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.²¹

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997), koordinasi dalam pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, serta mengatur gerak, langkah, dan waktunya untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Koordinasi ini harus dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Dalam konteks pembangunan, koordinasi perlu diterapkan mulai dari antar bagian proyek, program, sektor, sub-sektor, hingga antar bidang.

Usman Husaini menyatakan bahwa koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan-kegiatan terpisah agar tujuan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Lebih lanjut, Sutisna menjelaskan bahwa koordinasi adalah tahap untuk menyatukan berbagai bagian dari orang

²¹ Soewarno. Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta: CV Haji Masagung., 2004).

lain serta sumber daya lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²²

Koordinasi adalah proses mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara kegiatan fisik dan kegiatan rohaniah. Menurut Leonard, koordinasi secara luas diartikan sebagai "penyesuaian diri dari masing-masing bagian serta usaha untuk menggerakkan dan mengoperasikan bagian-bagian tersebut pada waktu yang tepat sehingga setiap bagian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap hasil keseluruhan".

Menurut Stoner dan Wankel (Rampengan et al., 2014:5), koordinasi yang efektif melibatkan beberapa elemen penting: komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan. Komunikasi merupakan kunci dari koordinasi yang efektif karena proses ini sangat bergantung pada pengumpulan, transmisi, dan pengolahan informasi. Kerjasama juga menjadi elemen penting karena koordinasi adalah hasil dari usaha bersama, sehingga kerjasama menjadi syarat mutlak untuk tercapainya koordinasi yang baik dan efektif. Integrasi atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dalam koordinasi yang efektif.²³

²² Evi Priyanti Qonita Widyaning Ratri, "Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 3 No.2 (2021): 34–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782>.

²³ Octafani Rempe, Muh. Yusril Ilyas, Ahmad Fajri Shafwan, Muhammad Syukur, "Meninjau Tantangan Dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan : Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar."

Penelitian ini menggunakan teori yang dicetuskan oleh Hasibuan (2006:88), yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi. Teori ini juga merupakan hasil adopsi dari beberapa pandangan para ahli, yang memberikan perspektif menyeluruh tentang bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi atau antarinstansi, yaitu:²⁴

a. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan mengacu pada tanggung jawab pemimpin dalam mencapai koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dan kegiatan setiap individu sehingga tercapai keselarasan dalam hasil yang diinginkan. Kesatuan tindakan yang berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri dan tugas yang diberikan, agar anggota organisasi tidak bekerja secara individual atau bergerak sendiri-sendiri

b. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, berasal dari kata "communication" dalam bahasa Latin yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena melalui komunikasi, pemimpin menyampaikan

²⁴ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

informasi atau tugas kepada bawahannya. Dalam koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan karena sebagian besar proses koordinasi dalam organisasi dilakukan dan ditentukan melalui komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan kepada setiap individu dalam organisasi, sehingga setiap anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajer. Secara teori, tujuan organisasi adalah mencapai target bersama, yang tidak bisa dicapai secara perseorangan. Dua kelompok dalam organisasi yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan akan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika dilakukan secara individual. Oleh karena itu, prinsip pembagian kerja adalah dasar dalam sebuah organisasi. Prinsip ini berarti jika organisasi ingin mendapatkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan, maka pembagian kerja perlu dilakukan. Pembagian kerja diharapkan dapat berfungsi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

d. Disiplin

Disiplin merupakan suatu usaha yang dilakukan yang bertujuan memastikan setiap tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan, sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

Teori Handayani (1989:88) menekankan bahwa efektivitas koordinasi dapat diukur melalui lima indikator:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam koordinasi yang efektif. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup:

- a. Informasi: Keberadaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Informasi yang dibagikan harus mencakup data tentang lokasi anak jalanan, jumlah, kondisi, dan kebutuhan mereka.
- b. Alur Informasi: Alur informasi mengacu pada bagaimana informasi tersebut disebarluaskan di antara para pihak yang terlibat. Alur informasi yang baik memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan, menghindari miskomunikasi, dan mempercepat proses koordinasi.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Misalnya, menggunakan sistem manajemen informasi berbasis web untuk berbagi data real-time tentang penanganan anak jalanan dapat mempercepat respons dan

memastikan semua pihak terlibat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran tentang pentingnya koordinasi menentukan bagaimana setiap pihak memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam upaya bersama. Ini mencakup:

- a. **Tingkat Pengetahuan Pelaksana:** Menunjukkan sejauh mana individu yang terlibat dalam penanganan anak jalanan memahami pentingnya koordinasi dan bagaimana melakukannya secara efektif. Pengetahuan ini melibatkan pemahaman terhadap prosedur, tujuan, dan manfaat koordinasi.
- b. **Tingkat Keselarasan:** Keselarasan antara tujuan, strategi, dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi dari individu yang terlibat dalam proses koordinasi sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kompetensi ini mencakup:

- a. Ada Tidaknya Pejabat yang Berwenang Terlibat: Pejabat yang berwenang perlu terlibat dalam proses koordinasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dukungan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan.
- b. Ada Tidaknya Ahli di Bidang Pembangunan: Kehadiran ahli dalam bidang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang relevan, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi.

3. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Faktor ini mencakup bagaimana komitmen, kesepakatan, dan insentif mempengaruhi koordinasi:

- a. Kesepakatan: Adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai tujuan, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diambil. Kesepakatan ini memastikan bahwa semua pihak berada pada halaman yang sama.
- b. Pelaksanaan Kegiatan: Implementasi dari kegiatan yang disepakati merupakan indikasi bahwa koordinasi berjalan dengan baik. Ini melibatkan tindakan konkrit yang diambil berdasarkan rencana yang telah dibuat.

- c. Sanksi: Keberadaan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban mereka dapat meningkatkan komitmen dan disiplin dalam koordinasi.
- d. Insentif: Insentif dapat memotivasi partisipasi aktif dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Insentif bisa berupa penghargaan atau keuntungan lain yang didapat ketika tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi dipenuhi dengan baik.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas dalam perencanaan menunjukkan bahwa koordinasi bukanlah aktivitas satu kali, tetapi proses berkelanjutan.

Ini melibatkan:

- a. Umpan Balik: Memberikan dan menerima umpan balik secara berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas koordinasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Umpan balik dari lapangan, baik dari masyarakat maupun anak jalanan sendiri, sangat penting dalam menilai keberhasilan upaya penanganan.
- b. Perubahan Terhadap Hasil Kesepakatan: Kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan umpan balik dan evaluasi terus-menerus

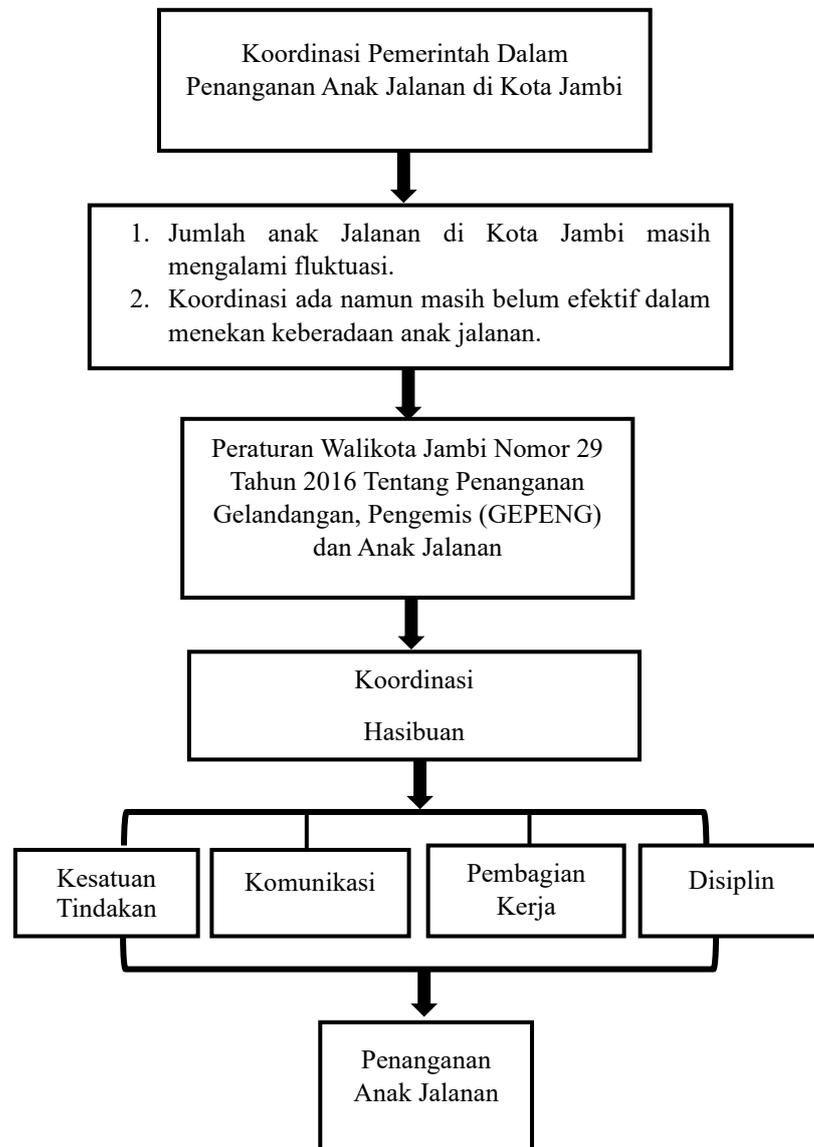
memastikan bahwa koordinasi tetap relevan dan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan yang berubah.

Menurut Handoko, koordinasi yang efektif dalam organisasi memberikan beberapa manfaat, antara lain:²⁵

1. Koordinasi membantu menghindari perasaan terpisah antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat dalam organisasi.
2. Koordinasi mencegah munculnya pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat tertentu lebih penting dari yang lain.
3. Koordinasi mengurangi kemungkinan munculnya konflik antara bagian-bagian dalam organisasi.
4. Koordinasi mencegah terjadinya kekosongan dalam pelaksanaan suatu aktivitas di dalam organisasi.
5. Koordinasi meningkatkan kesadaran di antara para pegawai untuk saling membantu.

²⁵ Yoakim antonius Mali, "Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)," *Jurnal Administrasi Negara* 1 No.1 (2019): 56–72.

1.6 Kerangka Berpikir



Di Kota Jambi, masalah anak jalanan masih menjadi perhatian serius karena jumlah mereka yang masih tinggi. Upaya koordinasi telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, namun hasilnya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya efektivitas dalam menekan keberadaan anak jalanan meskipun telah ada upaya. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat.

Selain itu, pendataan mengenai anak jalanan juga masih menjadi persoalan, karena kurangnya kedalaman dan informativitas data yang tersedia. Tanpa data yang akurat dan komprehensif, upaya untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pendekatan koordinasi dan juga dalam proses pendataan anak jalanan agar dapat mengidentifikasi akar masalah dengan lebih baik serta merancang strategi intervensi yang lebih efektif.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah kota jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan, yang berbunyi penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kota jambi dengan melibatkan dunia usaha dan elemen mapeneliti-rakat lainnya. Peraturan ini mencerminkan dorongan kuat untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan dan gelandangan dengan pendekatan koordinasi. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak bagi anak-anak serta mereka yang terpinggirkan di Kota Jambi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam pendekatan deskriptif peneliti menggambarkan suatu apa adanya yang di dapat dari hasil penelitian di lapangan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dengan model deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dengan detail semua data dan keadaan yang terkait dengan subjek dan objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan situasi yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan menyajikan informasi terkini yang dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diterapkan pada berbagai permasalahan yang relevan.²⁶

Jenis penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri. Selain itu, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan sulit dilakukan jika hanya diukur dengan angka saja, maka dari itu pemilihan jenis penelitian kualitatif

²⁶ I Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman mengenai dinamika interaksi antara pemerintah dalam penanganan anak jalanan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat Dimana peneliti akan mengumpulkan data yang tepat untuk menggambarkan situasi dari objek yang sedang dilakukan peneliti dengan akurat. Penelitian ini akan dilakukan di instansi ataupun pihak terkait yang melakukan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi dengan menggunakan teori koordinasi dari Hasibuan. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin mempengaruhi efektivitas koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan DPMPPA. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Peneliti memanfaatkan metode kualitatif dalam mengidentifikasi informan, untuk menentukan siapa yang akan menjadi informan sumber data. penentuan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang sedang diselidiki. Informan penelitian adalah individu yang secara rutin memberikan informasi mengenai situasi dan memiliki

pemahaman mendalam terhadap konteks latar belakang yang menjadikan mereka orang yang memiliki pengetahuan yang relevan terhadap pertanyaan peneliti.

Purposive Sampling, juga dikenal sebagai penentuan informan dalam dalam penelitian ini. Teknik tersebut melibatkan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu untuk mendapatkan data dari sumber yang relevan. Selain *Purposive Sampling*, *Snowball Sampling* juga digunakan dalam penelitian ini, *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*. *Key informan* ini membantu atau akan dapat berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Informan yang dipilih tersebut termasuk individu yang memiliki informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian yang sedang diteliti:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (PMKS) di Dinas Sosial, selaku penanggung jawab pada bidang rehabilitasi PMKS termasuk Penanganan anak jalanan.
2. Kepala Seksi OPS dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Sebagai salah satu badan yang ikut serta dalam penertiban anak jalanan di Kota Jambi.
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, selaku

badan yang bertanggung jawab atas penanganan kasus pelanggaran hak anak, serta advokasi dan edukasi masyarakat.

4. Mediator UPTD PPA di DPMPPA Kota Jambi selaku pihak yang memberikan edukasi dan advokasi terhadap anak jalanan.
5. Staff Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi, Selaku pihak yang ikut serta dalam proses rehabilitasi PPKS termasuk dalam hal penanganan anak jalanan.
6. Bapak Bahren Nurdin, SS.,MA., adalah seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin sekaligus pengamat sosial yang aktif di Kota Jambi. Beliau berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jambi. Dengan latar belakang akademis yang kuat, Bapak Bahren menawarkan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan perubahan sosial yang terjadi di kota ini.
7. Ibu Wenny Ira Reverawati, S.IP.,M.Hum., adalah seorang akademisi dari Universitas Nurdin Hamzah sekaligus pengamat sosial di Kota Jambi. Beliau berkontribusi dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat kota ini. Dengan keahliannya dalam ilmu sosial dan humaniora, Ibu Wenny menganalisis dan memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan publik serta dinamika sosial yang terjadi.

8. Anak Jalanan Kota Jambi, Selaku Objek Penelitian (1 Orang)
9. Anak Punk Kota Jambi, Selaku Objek Penelitian (1 Orang)

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi atas dua kategori, yakni data skunder dan data primer. Para peneliti memiliki beragam opsi sumber data, bergantung pada aspek yang ingin diteliti dan jenis data yang diinginkan. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Sumber data primer

Sumber data Primer didapati oleh peneliti secara langsung dan didapatkan dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dari informasi secara langsung terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan menghasilkan catatan lapangan atau catatan tertulis mengenai apa yang telah di dengar, dilihat, dialami maupu dipikirkan dalam rangka pengumpulan data terhadap data penelitian kualitatif, yang nantinya hasil dari catatan lapangan tersebut akan dipergunakan sebagai data penunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

- b. Data sekunder

Data skunder merujuk pada informasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk mendukung data primer. Jenis data sekunder ini mencakup:

- a) Buku: Buku yang berkaitan dengan *Koordinasi* ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- b) Peraturan perundang-undangan: Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penanganan anak jalanan guna memperkuat topik yang diangkat oleh peneliti.
- c) Jurnal: Jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti dan kemudian digunakan sebagai acuan peneliti pada penelitian skripsi.
- d) Dokumen: Dokumen tersebut berasal dari instansi yang melakukan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di kota jambi.
- e) Media digital (Berita): Dipergunakan sebagai data penguat pada penelitian skripsi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat melakukan beberapa hal seperti wawancara dan dokumentasi. Kedua hal tersebut sangat diperlukan sebagai upaya menggali informasi dan memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bukti dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti:²⁷

²⁷ Dr. Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi di antara dua orang yang saling menukar informasi dan gagasan melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban. Proses ini bertujuan untuk membangun makna, mencari solusi terhadap masalah tertentu, atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur sebagai Teknik pengumpulan data, yang Dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun, dalam hal ini peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui informasi yang dibutuhkan akan diperoleh. Selain itu, wawancara jenis semi- terstruktur juga dapat digunakan. Dalam hal ini, peneliti dapat memberikan ruang lebih terbuka bagi informan untuk berbagi perspektif, pemikiran, serta masalah yang mungkin belum teridentifikasi secara mendalam. Pihak-pihak yang telah ditentukan untuk wawancara akan diminta untuk menyampaikan pandangan mereka secara lebih bebas, yang memungkinkan peneliti untuk menemukan masalah atau perspektif yang belum terpikirkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa teks, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen tertulis berupa laporan kegiatan, laporan hasil

rapat ataupun rekapitulasi mengenai program-program yang telah dilaksanakan. Dan hasil dokumentasi dalam bentuk gambar seperti Foto kegiatan program.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terdapat 4 (Empat) aktivitas yang harus dikerjakan sampai tuntas dalam proses menganalisis data, yaitu:²⁸

1. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan saat wawancara dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari atas 2 bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

2. Reduksi Data

Reduksi data menjadi langkah awal yang esensial dalam pencarian tema dan pola yang relevan untuk fokus penelitian. Pencatatan, merangkum, dan pemilihan informasi yang krusial menjadi prioritas dalam proses reduksi ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah dan jelas terkait isu yang tengah diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dipelajari lebih lanjut dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

Data yang telah direduksi akan menjadi landasan yang kuat untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi

²⁸ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haldir, kelima (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

tambahan yang lebih relevan. Langkah ini akan mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang koordinasi yang terjadi antara pemerintah dan elemen lain dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

3. Penyajian data

penyajian data memiliki beragam bentuk untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik serta perencanaan langkah selanjutnya. Selain menggunakan teks naratif yang menjelaskan secara rinci tentang dinamika koordinasi, data juga disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan (network), dan chart. Grafik digunakan untuk menunjukkan perbandingan angka-angka terkait penanganan anak jalanan. Matriks bisa menggambarkan hubungan antar unsur dalam koordinasi. Sementara itu, jaringan (network) dapat menampilkan interaksi antara pemerintah, lembaga, organisasi, dan elemen masyarakat yang terlibat. Chart, seperti diagram alir (flowchart), bisa menyoroti langkah-langkah atau proses dalam upaya penanganan anak jalanan.

Penyajian data dalam berbagai bentuk ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan memudahkan peneliti dalam memahami dinamika koordinasi. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap keterkaitan berbagai elemen yang terlibat, diharapkan rencana kerja selanjutnya dalam

penanganan anak jalanan di Kota Jambi dapat disusun secara lebih terarah dan efektif.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap akhir penelitian melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Namun, kesimpulan ini tetap terbuka untuk perkembangan lebih lanjut karena penelitian belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang ada di lapangan.

Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Jambi, kesimpulan awal dapat menggambarkan sejauh mana koordinasi antara pemerintah dan pihak lainnya terbukti efektif atau masih memerlukan perbaikan. Kesimpulan juga bisa menyoroti keberhasilan, hambatan, dan potensi solusi yang muncul selama penelitian dilakukan.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data mencerminkan validitas dari hasil data dan informasi yang dihasilkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua informasi dan data telah diperoleh melalui proses pengamatan dan ketelitian yang memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Langkah-langkah ini diambil untuk memberikan jaminan dan memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya. Dalam menguji validitas data, peneliti

menggunakan beberapa mekanisme triangulasi, termasuk triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.²⁹

Dari beberapa mekanisme triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi Sumber untuk menguji keabsahan data, yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.³⁰ Hal itu dapat di lakukan dengan Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kemudian, Membandingkan apa yang di katakan orang didepan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi. Selanjutnya, Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Lalu, Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat Dan Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013.